Takut amat sih, Pak?

NGOPREK

one vol.3

FekriZufar, Tedjo, Xavi, Noor Hamka, Rio, Gazp

NGOPREK

Zine ini ditulis oleh tokoh fiksi, untuk kepentingan roleplay. Tapi gagasannya faktual, sih. Selamat meresapi.

Pada 10 November 2026, aksi damai di Yogyakarta berubah mencekam. Penyampaian aspirasi diekskalasi orang-orang tak bertanggung jawab. Aparat keamaan (polisi, TNI) sama sekali tidak memberikan rasa aman.

Kampus dan rumah sakit ditembaki gas air mata. Massa dilempari petasan. Malioboro, Sangaji, sampai Bundaran UGM dikepung pasukan bersepatu lars. **Bukan untuk melindungi, tetapi buat menggebuk, menangkap, menyakiti.**

Kami mengecam kekerasan aparat terhadap para aktivis. Kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara.

TUAN SERDADU YANG TERHORMAT, KEPADA SIAPA ANDA MENGABDI?

Noor Hamka

Tidak ada ciptaan manusia yang seambivalen kekuasaan–sesuatu yang paling paradoksal. Mengapa begitu? Sebab kekuasaan bisa sangat memukau melahirkan keteraturan, tetapi juga mengerikan saat mulai menyimpang. Atau dalam kata lain, kekuasaan rentan tergelincir jadi tirani. Sejak dulu, manusia berlomba-lomba jadi otak di balik perubahan, menciptakan banyak temuan untuk mendongkrak peradaban, lalu membangun negara untuk memagari wewenang. Rumusan demi rumusan hukum dilahirkan sebagai perisai bagi yang tertindas agar warga bisa hidup tanpa banyak cemas atas keselamatan diri. Setelah hukum, dibentuklah aparat untuk memelihara rasa aman itu. Maka, seorang aparat dilatih di barak untuk mengabdi pada negaranya.

Negara yang mana? Mungkin jawaban yang paling instan adalah Indonesia yang teritorial. Mungkin pemerintah. Mungkin instansi. Mungkin presiden. Mungkin wakil rakyat. Mungkin Jawa. Mungkin Kalimantan. Mungkin Sumatra. Mungkin Sulawesi. Mungkin Maluku. Mungkin Papua. Semua tidak ada yang salah. Saya pun berpikir bahwa menjadi aparat begitu mulia, sehingga beban melindungi "negara" turut mencakup hal-hal tinggi. Setidaknya, itu yang ada dalam kepala saya saat berumur 10. Padahal sila kelima Pancasila sudah menjawab pertanyaan itu.

Negara yang mana? *Seluruh rakyat Indonesia.* Maka, lagi-lagi, seorang aparat dilatih di barak untuk menjaga dan melindungi rakyat. Sebab dewasa kini saya menyadari, negara tanpa rakyatnya bukanlah entitas yang berdaulat. Dewasa kini saya memahami, aparat mestilah gigih mengabdi kepada seluruh elemen masyarakat. Dewasa kini saya jadi mengerti, aparat adalah alat negara. Sayangnya, ada ironi besar yang sifatnya struktural, yang terjadi berulang-ulang dalam sejarah bagai kutukan: alat pelindung bersenapan yang dihadirkan sebagai penangkal penindasan dan kriminalitas, ternyata bisa berubah jadi algojo rakyat. Tapak sepatu lars justru mampu bermutasi jadi stempel di ceruk leher warga sipil, tidak peduli usia berapa.

Teruntuk Tuan Serdadu yang terhormat, apakah Anda pernah memikirkan ironi itu?

Pertanyaan ini bukan untuk meragukan kegagahan seragam Anda. Saya ingin membedah isi kepala Anda dan seberapa dalam nalar di baliknya. Saya penasaran, selama masa pendidikan, apa ada silabus yang mengajarkan bahwa kekuatan tertinggi diukur dari kemampuan fisik saja? Dari segala ahli dominasi, diskriminasi, represi, apakah itu yang diajarkan dari seluruh gemblengan yang Anda dapatkan? Bukan nalar kritis? Bukan kebijaksanaan melindungi? Bukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

Tuan Serdadu yang terhormat, lantas kepada siapa Anda mengabdi?

Kita tampaknya salah mengartikan arti ketertiban yang sesungguhnya. Salah paham ini mestinya kita luruskan. Tertib mana yang Tuan Serdadu pahami? Negara yang warganya bungkam, jalan-jalannya lengang dari demonstrasi, kematian massa aksi tanpa sidik jari, atau yang pemerintahnya abai akan keluhan? Betapa praktisnya demokrasi jika memang sesederhana itu. Tidak perlu kebijakan, tidak perlu jawab kritik, tidak perlu diadili. Negara cukup kerahkan Tuan Serdadu untuk bubarkan kerumunan, Tuan pilih satu di antara kami yang paling cocok untuk disebut "oknum", lalu umumkan saja situasi sudah di bawah kendali. Bukankah keputusan itu sama dengan mereduksi kebebasan demi menciptakan kepatuhan?

Tuan Serdadu, perlu diingat bahwa seluruh atribut negara yang melekat pada diri Anda—dari seragam hingga perlengkapan—bersumber dari keringat warga yang bekerja, bertani, dan membayar pajak. Tidak lupa pula kendaraan yang dengan bangga Anda naiki dari roda dua sampai roda empat. Sungguh hubungan yang menggelikan apabila seseorang menggunakan uang warga untuk membeli alat yang kemudian dipakai menganiaya warga itu sendiri.

Sebetulnya, Anda tidak perlu memenangkan perdebatan dengan rakyat menggunakan pentungan. Tidak perlu membuktikan kewibawaan Anda dengan gas air mata. Anda juga tidak perlu menganggap setiap suara warga sipil yang menentang kekuasaan sebagai ancaman terhadap negara. Sebab, begini, Tuan Serdadu yang terhormat, kedaulatan republik ini bersemayam di tangan warga negara. Negara ini bukan milik Anda. Seharusnya Anda lebih paham perihal melindungi, bukan begitu?

Maka di balik tameng dan moncong laras yang Anda todongkan kepada kami, ibu kami, ayah kami, saudara kami, teman-teman kami, jawablah ironi ini.

TUAN SERDADU YANG TERHORMAT, KEPADA SIAPA ANDA MENGABDI?



A.C.A.G, AKTOR CENTENG AHLI GEBUK

FekriZufar

Serupa pabrik romusha yang membutuhkan centeng
Demokrasi berada di tangan kami yang menggenggam beceng
(Bars of Death - A.C.A.G)

Pagi setelah 10 November saya terbangun dengan berita membanjiri setiap lini maya. Langsung saya sikut sobat saya buat ikut membaca. Kawan-kawan aktivis ditembaki gas air mata, dipukuli, ditangkap aparat. Mereka yang lari ke gang-gang pemukiman masih dikejar mampus, rumah warga digedor, setiap KTP diperiksa dan kalau ketahuan bukan warga di sana langsung diangkut tanpa alasan jelas. Rumah sakit tidak lepas dari serangan. Begitu pula kampus. Mahasiswa, buruh, aktivis menggigil sepanjang malam. Sementara mobil-mobil rantis seliweran, aparat berseragam taktis menangkap siapa saja di depan mata. Tak lama berlalu, kamera warga menangkap sekelompok laki-laki berpakaian preman menaiki truk Polisi. Ada juga yang diboncengi motor-motor aparat ke tempat titik-titik kerusuhan dimulai.

Aksi damai telah disabotase. Aktor centeng ahli gebuk turun gunung buat mengacau, menciptakan alasan buat menggiring suara-suara kritis menjadi sebentuk kriminalitas yang layak dihakimi.

Peristiwa 10 November di Jogja kurang lebih mengingatkan saya sama kejadian di Bandung, tanggal 1 dan 2 September tahun lalu. Kampus UNPAS dan UNISBA juga diserang aparat setelah aksi. Setahun berlalu, jutaan kali tuntutan melawan tindakan represif aparat digemakan, tetapi perubahan sama sekali tidak tampak.

Serangkaian peristiwa itu membuat saya kembali mengunjungi larik-larik api Bars of Death, tepatnya A. C. A. G. All Cops are God. Track rap ini rilis tahun 2014, menceritakan sebuah kisah satir dari POV aparat yang merasa dirinya Tuhan karena punya kuasa sebegitu luasnya buat menghakimi dan menentukan nasib seseorang. Sudah 12 tahun berlalu, tetapi lagu ini masih relevan. Apa yang diberitakan baitnya masih kejadian. Dan entah kapan bakalan berakhir.

Tulisan kali ini tidak akan mengupas lirik menggunakan berbagai teori atau menelaah makna simbolik darinya. Tulisan kali ini adalah refleksi. Serangkaian ingatan soal kekerasan A. C. A. G. Aktor Centeng Ahli Gebuk.

Menjelaskan apa yang terjadi hari ini dapat berangkat dari sebuah buku berjudul Politik Jatah Preman, ditulis oleh Ian Douglass Wilson. Teori dari Max Weber yang tercantum pada buku ini menyatakan bahwa negara secara logis mengharuskan untuk berupaya menghapus atau meredam setiap pesaing internal atau eksternal terhadap monopolinya. Hal ini termasuk menggunakan kekuatan fisik atau kekerasan secara absah, melalui perangkat-perangkat yang dimilikinya. Polisi, tentara, adalah contoh dari kekuatan fisik itu. Mungkin dari sana larik dari Bars of Death yang berbunyi, "**Kami mafia yang dilegalkan, *darklords* adalah rekanan**" lahir. Mereka yang berseragam memang memiliki "kewenangan" untuk menggunakan kekuatan fisik dalam mengamankan *sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku.*

Lantas apakah yang terjadi pada 10 November dan aksi represif lainnya sesuai hukum dan norma?

Selain yang berseragam cokelat dan loreng, ada pula aktor lain yang berperan dalam kekerasan negara. Para jago, preman, ormas. Entitas ini sekilas terlihat seperti kelompok yang berkembang di luar kendali negara. Seolah merupakan dampak dari kekosongan negara. Namun, sebetulnya kelompok-kelompok ini adalah bagian dari dominasi negara dalam praktik sehari-hari. Tujuannya tak lain adalah untuk melindungi elite dan mempertahankan status quo, melalui tindakan kekerasan atau pemaksaan terhadap sumber kekuatan yang bertentangan, seperti mahasiswa, aktivis, LSM, dan sebagainya.

Kehadiran aktor kekerasan informal seperti preman, ormas, dan jago-jago lokal sudah hadir di Indonesia dan berkolaborasi dengan aparat negara sejak era kolonial. Pemerintah Belanda mengandalkan para jawara untuk mengawasi wilayah, menjaga stabilitas, dan memungut pajak. Pada masa pra-orde baru, negara membuat angkatan bersenjata dari Laskar Rakyat, tetapi masih hadir kelompok "keamanan" dari organisasi lokal dan milisi sipil. Pada masa ord baru, Soeharto memelihara ormas preman sebagai perpanjangan kekerasan negara, untuk mengontrol kondisi sosial dan politik. Pasca reformasi, kelompok ini tidak entas, mereka justru menjadi kelompok paramiliter yang lekat keterkaitannya dengan aparat keamanan negara. *Guard labour* di Indonesia sedari dahulu sudah terpecah belah, tetapi semua ini memiliki tujuan yang sama, untuk melindungi elite dan mempertahankan status quo. Lebih dari itu, entitas-entitas "penjaga keamanan" ini dipelihara oleh negara supaya kekuatan fisik dan pemaksaannya hadir di setiap lini kehidupan masyarakat.

Praktik kekerasan informal di lini masyarakat ini lestari sebab kulturnya diturunkan generasi ke generasi melalui reproduksi sosial. Anggapan bahwa mereka yang berseragam, mengontrol, dan punya kewenangan akan sebuah wilayah serta menggebuk yang bertentangan adalah posisi paling nyaman di masyarakat terus bergulir, terutama di kelompok sosial dengan ekonomi rendah. Banyak pula yang memilih untuk menjadi aktor kekerasan informal demi mencari sesuap nasi. Kombinasi faktor ekonomi dan doktrin kekuasaan melalui simbol-simbol itu menjadikan kekerasan dan pemaksaan sebagai suatu budaya yang lestari. Muara yang lebih buruk, reproduksi sosial ini merawat impunitas pelaku kekerasan negara. Seperti yang disebutkan Bars of Death,

"Persetan bantuan hukum yang hafal ribuan pasal. Kami adalah hukum, maaf, kami adalah Tuhan dalam Arsenal"

Kekerasan negara dalam segala bentuk jelas melukai *rule of law* negeri ini, di mana semestinya kedudukan tertinggi adalah hukum. Setiap komponen negara mesti tunduk pada hukum yang berlaku. Gagasan bahwa aktor centeng ahli gebuk sebagai *Tuhan* karena mereka punya kewenangan memegang pentungan adalah absurd. Sebuah waham kebesaran yang dipupuk oleh kelompok elite yang setiap hari dimanjakan status quo.

Penggunaan kekuatan dan pemaksaan oleh aparat harus mengikuti prinsip HAM. **Legalitas**, tindakan memiliki dasar hukum yang sah. **Nesesitas**, kekuatan digunakan ketika benar-benar diperlukan. **Proporsionalitas**, besar kekuatan yang digunakan harus sesuai dengan besar ancaman yang dihadapi. **Pencegahan cedera**, tindakan aparat harus mencegah cedera serius dan kematian. **Akuntabilitas**, setiap tindakan harus dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan. Jadi, kejadian 10 November ketika aksi damai tiba-tiba rucuh karena barisan aparat menembakkan petasan dan gas air mata untuk membubarkan masa jelas-jelas absurd. Apalagi pembiaran gerombolan berpakaian preman yang memulai kerusuhan di depan gedung Swis-belboutique, CIMB Niaga-Gramedia, Bank Mandiri, dan Tugu Pal Putih. Semua upaya tersebut tak ayal tampak sebagai upaya untuk mengubah hak menyampaikan kritik sebagai tindak kriminalitas. Saat kekerasan negara sudah terjadi, apa yang terbit selanjutnya adalah impunitas. Sebab negara tidak mungkin menghukum pelaku kekerasa yang dilakukan untuk melindungi dirinya sendiri, bukan?

Impunitas akan langgeng karena keterbungkaman. Kekerasan akan terus bergulir jika diberi makan takut.

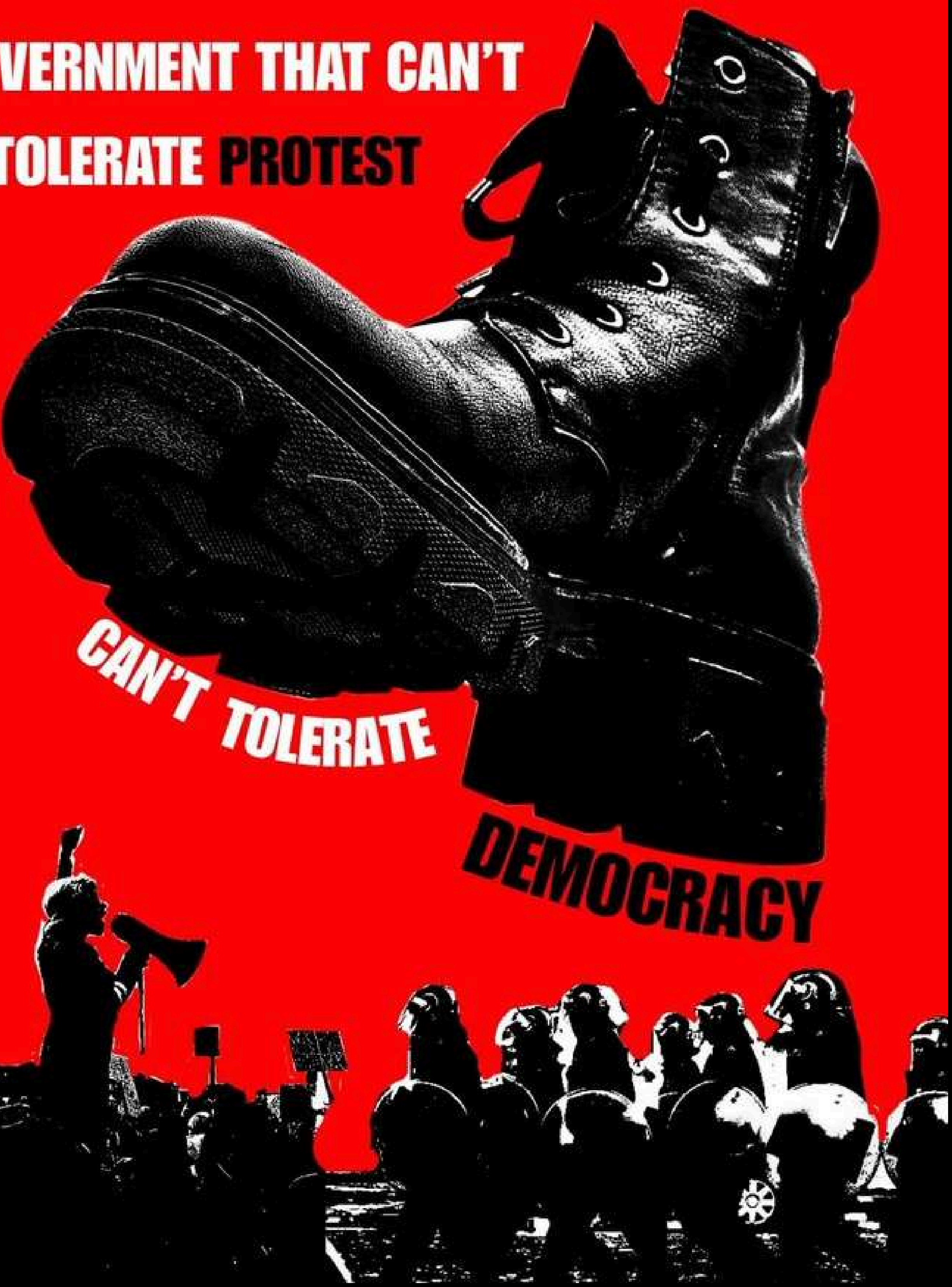
Tugas utama kita memang tidak tertangkap dan tidak terluka. Namun, kecaman dari aparat cemen tukang gebuk bukan apa-apa dibandingkan kekuatan masyarakat dan hukum. Menyampaikan pendapat adalah hak seluruh warga negara, tercantum pada UUD 1945 pasal 28E ayat (3). Kampus sebagai pendidikan tinggi menjamin kebebasan akademik dan penyampaian pendapat, tercantum pada UU No. 12 tahun 2012.

Terus bersuara.
Terus ekspos centeng-centeng negara.
Jaga kanan-kiri. Warga jaga warga. *Protest and survive.*



SINGKIRKAN APARAT DARI KAMPUS
DEMOKRASI BUKAN ANCAMAN

A GOVERNMENT THAT CAN'T TOLERATE PROTEST



CAN'T TOLERATE DEMOCRACY

NEGARA DI MANA RAKYAT SELALU JADI PERAN JAHAT

RIO

Di negara saya, rakyat selalu dianggap salah,
Di negara saya, rakyat selalu dianggap ancaman,
Di negara saya, rakyat selalu jadi peran jahat.

Menurut KBBI, kata jahat diartikan sebagai sesuatu atau hal yang sangat jelek, buruk; sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan). Tapi, apakah rakyat sudah berbuat jahat?

Katakanlah saya bukan orang yang paham secara mendalam mengenai politik dan hukum, jadi saya akan melihat dari perspektif awam yang menilai benar atau salah dari didikan norma.

Pada dasarnya, apabila ada ketidakadilan atau ketidaksesuaian, bukankah rakyat berhak untuk bicara?

Cara seseorang untuk bicara memang berbagai macam. Ada yang secara implisit, seperti sindiran dan sarkasme tanpa mengejek atau menyakiti; ada pula yang eksplisit dan tegas.

Waktu sekolah saya diajarkan mengenai istilah demonstrasi, yang punya nama lain unjuk rasa, salah satu opsi lain untuk bicara pada penguasa negara. Berbagai pengetahuan dasar mengenai unjuk rasa dengan baik pun sudah ditanamkan.

Pada dasarnya, rakyat kebanyakan tahu bagaimana cara untuk bicara secara baik-baik.

Namun, nyatanya rakyat dianggap berbahaya saat mereka mau bicara. Segala perlengkapan disiapkan oleh penguasa negara seakan-akan hendak melawan musuh terkuat. Pasukan bersenjata berderet membentuk benteng penghalang. Padahal, rakyat cuma mau bicara.

Makhluk mana, sih, yang tidak was-was melihat senjata di depan mata? Membayangkan timah panas yang bakal menembus kepala mereka ketika mereka bicara? Membayangkan mereka tak akan pulang ke rumah hanya karena bicara?

Alhasil, rakyat jadi dibuat takut, rakyat terpaksa bungkam, rakyat terpaksa tunduk.

Bahkan, penguasa negara doyan bikin panggung drama yang dipertontonkan ke orang-orang awam agar rakyat yang bicara dinilai sebagai hal yang anarkis. Mereka membuat skenario apik di mana mereka selalu jadi peran baik nan polos, sedangkan rakyat akan selalu jadi peran jahatnya.



DI NEGARA SAYA, PENGUASA DOYAN MAIN SANDIWARA, DI NEGARA SAYA, RAKYAT SELALU JADI PERAN JAHAT.

MONCONG SENJATA DI ATAS TANAH RAMPASAN: WAJAH FASISME DI KOTA "ISTIMEWA"

Xaviero

Brosur-brosur pariwisata boleh terus menjajakan Jogja sebagai panggung harmoni, kota pelajar yang ramah, dan ruang temaram bagi mereka yang mabuk nostalgia. Namun bagi rakyat yang ruang hidupnya digerus perlahan, topeng kesantunan feodal itu telah lama membusuk. Di balik narasi kebudayaan adiluhung yang diagung-agungkan elite, Jogja hari ini adalah **ladang jarahan**. Air tanah disedot habis demi kolam renang hotel berbintang, kampung-kampung kota digusur atas nama estetika tata ruang, dan tanah-tanah pesisir serta perkampungan dikapling paksa menggunakan dalih hukum pertanahan warisan kolonial.

Kekerasan aparat terhadap kawan-kawan aktivis di Jogja kemarin bukanlah bentrokan acak, bukan pula histeria sesaat dari aparat yang kelelahan di lapangan. Kekerasan itu adalah kepanjangan tangan langsung dari mesin perampasan ruang hidup. Ada korelasi telanjang yang tak bisa lagi ditutupi, "*semakin rakus oligarki menancapkan modalnya di tanah ini, semakin buas pula aparat dikerahkan untuk memukul mundur siapa saja yang berdiri menghadang.*"

Aparat keamanan yang digaji dari keringat buruh dan petani tak ubahnya centeng berseragam dinas. Mereka hadir bukan untuk menjamin rasa aman warga, melainkan untuk mengamankan jalur masuk eskavator investor. Ketika petani mempertahankan sawahnya, mereka ditakut-takuti pasal perusakan. Ketika warga kota menolak digusur dari tanah yang mereka huni puluhan tahun, barikade kawat berduri digelar di depan rumah mereka. Dan ketika mahasiswa bersama para aktivis membangun simpul solidaritas untuk melawan pemiskinan struktural ini, moncong senjata, gas air mata, serta pentunganlah yang ditugaskan memecah barisan.

Pola ini gamblang dan berulang, ciptakan regulasi yang melegalkan perampasan tanah, bungkus dengan jargon "**pembangunan strategis**", lalu mengirim pasukan bersenjata lengkap untuk memukul siapa pun yang berani membongkar borok tersebut. Mereka ingin menjadikan Jogja sebagai surga bagi pemilik modal dan neraka yang membungkam warganya sendiri. Keheningan yang mereka sebut "*kondusif*" adalah keheningan kuburan di mana rakyat kehilangan tanah, kehilangan air bersih, kehilangan ruang bersuara, tetapi dipaksa tetap tersenyum di hadapan moncong laras.

Kawan-kawan yang tubuhnya lebam dihantam sepatu lars kemarin bukanlah korban pertama, dan kekuasaan tidak akan berhenti di situ selama ruang hidup kita masih dianggap komoditas yang bisa diperjualbelikan. Membicarakan kekerasan aparat tanpa membicarakan perampasan tanah di Jogja adalah kenaifan yang fatal. Kekerasan itu ada justru karena modal butuh rasa aman untuk menjarah tanpa gangguan.

Melalui lembaran zine ini, kita menarik garis demarkasi yang tegas. Tubuh kawan-kawan boleh saja diseret dan darah mereka membasahi aspal, tetapi memori perlawanan tak akan pernah bisa dihabisi dengan gas air mata. Setiap jengkal tanah yang dirampas dan setiap luka yang diukir pentungan aparat adalah bahan bakar amarah yang tak akan padam. Kita tidak sekadar menuntut aparat diadili; kita menuntut tanah, air, dan ruang hidup kita dikembalikan ke tangan rakyat.





Art by @wirtams via Instagram

INDONESIA BIKIN MAX WEBER JADI PENJUAL ODOL KELILING

Tedjo

Max Weber tiba-tiba bangkit dari kubur saat polisi melempar gas air mata ke kampus.

Bapak sosiologi modern asal Jerman itu tadinya sudah tidur nyenyak di pemakaman Bergfriedhof, Heidelberg, sejak tahun 1920. Tapi rupanya, bunyi pop! pop! desisss! dari pelontar gas air mata yang ditembakkan beruntun pada pukul empat subuh di Indonesia itu saking berisiknya sampai menembus alam baka.

Begitu membuka mata, Weber bukannya disambut malaikat atau padang rumput surga, melainkan kabut putih pekat hasil pengadaan barang dan jasa APBN yang nyasar sampai ke gerbang kampus dan lobi rumah sakit. Belum sempat ia merapikan jas tuanya, paru-paru dan matanya sudah langsung disengat rasa perih yang luar biasa.

"*Gott im Himmel*! Ini neraka jahanam sebelah mana lagi?!" teriak Weber sambil terbatuk-batuk sampai jenggot Jermannya bergetar hebat.

Di tengah kepulan asap kimia yang bikin ingusnya meler tak terkendali itu, Weber melihat pemandangan yang membuat otak konslet. Puluhan mahasiswa berjaket almamater lusuh sedang berlarian mencari perlindungan di halaman kampus, sementara di luar pagar, barisan aparat berseragam lengkap dengan tameng dan helm taktis sedang asyik mempraktikkan simulasi *Call of Duty* versi anggaran negara. Padahal jam dinding di pos satpam baru menunjukkan pukul empat pagi, jam dimana ayam jago pun masih malas bangun dan memilih *snooze* alarm.

Dengan mata berair dan napas megap-megap, arwah Weber berjalan sempoyongan menghampiri seorang Komandan lapangan yang sedang berdiri gagah di samping mobil *water cannon*.

"Permisi, Komandan!" tegur Weber sambil menyeka ingus pakai ujung lengan jas. "Saya Max Weber! Seratus tahun lalu, ketika saya nulis buku *Politics as A Vocation* yang membahas bahwa negara adalah institusi yang memegang monopoli atas penggunaan kekerasan fisik yang sah, maksud sah-nya bukan begini, Komandan! Maksudnya sah dalam artian kekuasaan dipakai untuk melindungi warga secara rasional dan proporsional. Lah ini jam empat subuh, kenapa anak-anak itu ditembakin gas beracun?"

Si Komandan menoleh santai, menatap Weber dari ujung sepatu sampai ujung jidat.

“Bapak siapa? Pengamat politik dari LSM asing?” jawab Komandan datar dari balik kaca helmnya. “Ini semua sah kok, Pak. Sesuai prosedur, kami dapat surat lembur. Tabung gasnya juga inventaris barang milik negara. Jadi ditembakkan kemanapun kami sedang melindungi negara.”

Weber bengong, “Tapi itu di sebelah ada rumah sakit, Komandan!” protes Weber sambil menunjuk ke arah gedung rawat inap yang ikut tertutup kabut asap putih.

“Di hukum perang internasional aja rumah sakit itu suaka yang haram disentuh! Masa di negara yang katanya lagi tidak perang, orang sakit malah dikasih sarapan gas air mata?!”

“Ya salah sendiri, Pak,” sahut Komandan, mengelap pelindung wajahnya yang berembun. "Siapa suruh rumah sakitnya dibangun nempel sama lokasi kami kerja? Lagian gas air mata kami ini sangat demokratis dan menjunjung tinggi asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kami tidak membeda-bedakan latar belakang: mau aktivis mahasiswa, mau satpam kampus, mau dokter jaga, sampai pasien BPJS kelas tiga, semuanya dapat kuota hirup yang setara. Bukannya orang Eropa kayak Bapak suka banget sama inklusivitas?"

Weber menepuk jidatnya keras-keras. Belum selesai keterkejutannya, ia menengok ke arah gerbang kampus yang berlubang. Di sana, beberapa mahasiswa tampak menyeret kawan mereka yang pelipisnya bocor mengucurkan cairan merah segar akibat dihantam selongsong gas air mata yang ditembakkan mendatar—sebuah teknik tembakan yang di buku manual pabriknya sendiri jelas-jelas dilarang karena bisa bikin orang langsung pindah alam.

Di aspal yang basah, tetesan merah itu mengalir bercampur dengan genangan air parit.

Tiba-tiba, dari radio HT di bahu Komandan, terdengar suara laporan petugas dengan nada yang lempeng, “*Laporan situasi pukul empat dua belas, kampus dan sekitarnya steril serta kondusif. Hanya ada sedikit gesekan di lapangan dan ceceran saus cilok di trotoar. Ganti.*”

Darah Weber yang mendidih. Emosi Jermannya meledak. Ia maju selangkah, mencengkram kerah rompi antipeluru Komandan, menunjuk tepat ke genangan di bawah sepatu lars mengilap tersebut, “**Darah itu merah, Komandan!**” bentak Weber dengan suara menggelegar. “**Itu darah! Bukan saus cilok! Bukan cat spanduk! Kalian ini dibeliin seragam, tameng, sama peluru pakai duit pajak rakyat, kok rakyatnya malah kalian buru kayak hama?!**”

Si Komandan tak berjengit. Dengan ketenangan birokratis, ia menjawab, “Kami tahu darah itu merah, Pak Weber. Masalahnya, kami pakai kacamata hitam taktis. Warna darah di aspal, jas almamater, tembok rumah sakit semuanya terlihat sama saja. Abu-abu, bikin sepet pemandangan pejabat aja.”

Detik itu juga, Max Weber menyerah kalah.

Ia sadar, berdebat soal kontrak sosial, etika tanggung jawab negara, dan hak asasi manusia dengan aparat yang hobi menyelesaikan masalah komunikasi menggunakan mesiu adalah perbuatan paling sia-sia di muka bumi. Teori sosiologi kelas beratnya sama sekali tidak laku di hadapan logika pentungan.

Maka, ketika azan subuh mulai berkumandang bersahut-sahutan dengan bunyi sirine ambulans, bapak sosiologi modern itu memutuskan untuk tidak kembali ke kuburannya di Jerman. Ia memilih memutar balik langkahnya menuju warung kelontong 24 jam terdekat.

Lima belas menit kemudian, di antara kepulan sisa gas air mata di depan gerbang kampus dan rumah sakit, terdengar suara bule Jerman paruh baya sedang berteriak menjajakan dagangan barunya:

“ODOL... ODOL... TIGA RIBUAN AJA, KAWAN-KAWAN! DIOLES DI BAWAH MATA BIAR NGGAK PERIH!”




ADALAH PENTOK
KELUARGA
MERUPAKAN
KUASA ANG



Part of Markah Ekosistem (2026)